

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2011). Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government. Ph.D dissertation, Curtin University.
- Akbar, R., Pilcher, R.A., & Perrin, B. (2015). Implementing Performance Measurement System: Indonesian Local Government Under Pressure. *Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 12, No. 1*
- Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4 th. ed. *California: SAGE Publications, Inc.*
- Christy, Yunita., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP pada Pemerintah Daerah Kota Bandung (Studi Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). *Jurnal Akuntansi Maranatha, Vol. 9, No. 2.*
- Baskoro, F. R., & Akbar, R. (2018). Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1 No 2.*
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik untuk Indonesia. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- DiMaggio, P. dan W.W. Powell. (1983). The Iron Cage Revisited: Collective Rationality and Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review* 48 (2):147-60.
- Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, (2020). "Penghargaan SAKIP Award". Diakses dari <https://sulselprov.go.id/welcome/post/penghargaan-sakip-award-10-daerah-di-sulsel-peroleh-predikat-b> pada 2022.
- Friedman, Mark. (2005). Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measureable Improvements For Customers and Communities. FPSI Publishing.
- Gani, F. S. (2012). Implementasi Entrepreneur Government Dalam Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No.2.*
- Greenwood, R. dan Suddaby, R. (2006). Institutional Entrepreneurship In Mature Fields: The Big Five Accounting Firms. *Academy of Management Journal, Vol. 49, No. 1.*
- Hambawanta, Catur dan Akbar, Rusdi. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., (2012). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, United Kingdom.
- Humas Menpanrb, (2022). “*Akselerasi Reformasi Birokrasi Terus Berlanjut di 2022*”. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-reformasi-birokrasi-terus-berlanjut-di-2022> pada 2022.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kloot, L. (1999). Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government. *The International Journal Of Public Sector Management, Vol. 12 No. 7, 1999*.
- Krisanti, N. P. (2015). Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kurniawan, D. (2019). Pengembangan Indikator Kinerja Pada Organisasi Publik (Studi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Knowlton dan Phillips. (2013). *The Logic Model Guidebook, Better Strategies for Great Results*. SAGE Publication, Inc.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
- Longo, Paul J. (2002). *Logic Models In Evaluation Design*. Ohio Program Evaluator Group, Evaluation Basic Workshop, November 15&16 2002, 2011. An Approach to Performance Measurement: Using the Performance Blueprint and Related and Related Ongoing Performance Measurement & Management (OPM&M) Techniques.
- Luneto, A. R. & Bastian, Indra (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo). Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mariandini, F. I., Irianto, G., & Nurkholis, D. (2018). Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Economia, Vol. 14, No. 1*.
- Nabiha, Siti., dan Jurnal, T. (2018). Institutional Work and Implementation of a Performance Measurement and Management System in a Developing Country. *Journal of Accounting & Organizational Change, Vol.16, No.3*.
- Nashar, Abdul. (2019). Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Reinventing Government “*How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*”. *Journal of Political Science, Vol. 1, No. 1*.

- Osborne, D., & Gabler, T. (1996). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. Rosyid, A. (penerjemah). *Mewirusahaakan Birokrasi, Seri Manajemen Strategi*. PPM, Jakarta.
- Pacheco, F. D., York, G. J., Dean, J. T., & Sarasvathy, D. S. (2010). The Coevolution of Institutional Entrepreneurship: A Tale of Two Theories. *Journal of Management, Vol. 36. No. 4*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Raharja, E. L., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Universitas IPB. Bogor.
- Rahmadoni, F., & Erwandi. (2018). Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang, Vol. 4. No.1*.
- Rahmat. M., & Akbar, R. (2017). Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Studi Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tambora, Vol. 2. No. 1*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal dan Prosiding SNA, Vol. 15*.

- Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, Vol.16 No. 2.
- Sabaryanto, Teguh dan Akbar, Rusdi. (2017). Evaluasi Implementasi Sakip Organisasi Publik : Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yandip. (2019). “*Bupati Targetkan SAKIP Klaten Raih Nilai A*”. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-targetkan-sakip-klaten-raih-nilai-a/> pada 2022.